

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti dan analisis data yang terdapat pada bab sebelumnya maka Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri di Desa Wisata Brayut dan Desa Wisata Pajangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### A. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata memiliki efek dan dampak yang berbeda di setiap desa wisata, salah satunya adalah perbedaan yang terjadi di Desa Wisata Brayut dan Desa Wisata Pajangan di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Kedua desa wisata tersebut mendapat manfaat PNPM Mandiri Pariwisata sebanyak tiga kali pada tahun 2009, 2010, dan 2011.

#### 1. Sumber Daya Memadahi Untuk Mendukung Kebijakan

Dari hasil penelitian terdapat perbedaan diantara kedua Desa, di Desa Brayut dimana masyarakat memahami dengan baik mengenai PNPM Mandiri, dikarenakan adanya kepengurusan dan selalu di sosialisasikan kepada masyarakat ketika ada informasi-informasi terkait mengenai PNPM Mandiri. Berbeda dengan Desa Pajangan masyarakat tidak memahami dan mengerti mengenai Program pemerintah PNPM Mandiri, dikarenakan tidak ada sosialisasi yang mendalam untuk mengenalkan program PNPM Mandiri kepada masyarakat desa Pajangan dan Di Desa pajangan pengurus yang bertanggungjawab tidak berjalan dengan baik sehingga terputusnya informasi. Untuk kesuksesan sebuah program tentunya terdapat sumber daya yang memadai untuk mendukung dan mensukseskan sebuah kebijakan dalam hal ini tentunya masyarakat itu sendiri selaku actor yang menjalankan program.

## 2. Pelaksanaan Kebijakan disebutkan dengan Jelas atau tidak

Dalam kemajuan dan kesuksesan sebuah program tentunya harus ada yang bertanggungjawab untuk memberikan pelatihan dan pengarahan. Dalam berjalannya kebijakan di kedua desa ini (Desa Brayut dan Desa Pajangan) terdapat kesamaan, dimana pelaksana kebijakan tidak dijelaskan dengan jelas, semua dikembalikan ke masyarakat instansi yang terlibat seperti Lembaga Kesuadayaan Masyarakat (LKM) yang dalam perakteknya menjadi Badan Kesuadayaan Masyarakat (BKM) pada Desa Pendowoharjo yang bertanggungjawab atas Desa Brayut dan Pajangan tidak sesuai dengan LKM yang dimaksud dalam Permen KM.18/HM.001/MKP/2011. Dalam peraturan tersebut LKM adalah Lembaga yang dibentuk secara Partisipatif oleh masyarakat dan bertugas sebagai pengelola pelaksana PNPM mandiri Pariwisata pada tingkat Desa/Kelurahan/Kampung.

## 3. Kelompok-Kelompok Kepentingan Terwadahi di Dalam Kebijakan

Didalam kelompok-kelompok kepentingan di kedua desa (Desa wisata Brayut dan Desa wisata Pajangan) seharusnya sudah terwadahi dalam kebijakan tetapi dalam perjalanan salah satu desa tidak berjalan dengan efektif. Masyarakat Desa Wisata Pajangan tidak begitu merasakan adanya Program PNPM MAndiri, dikarenakan tidak adanya transparansi dan informasih-informasih yang jelas, masyarakat tidak dilibatkan dalam menentukan kegiatan atau pengelolaan anggaran, dari dana/anggaran yang didapat Desa Wisata Pajangan, hanya mengasihkan seperangkat gamelan untuk pertunjukan seni yang ada di Desa Wisata Pajangan.

Berbeda dengan Desa Wisata Brayut, masyarakat merasakan dampak dari Prongram PNPM, terjadi perubahan yang sangat baik, masyarakat dilibatkan dalam setiap kegiatan, transparansi anggaran, fasilitas, jumlah homestay, dan jumlah kunjungan juga di laporkan,

serta pengurus desa wisata mengizinkan siapa saja yang menginginkan laporan-laporan tersebut karena tersedia softcopy.

#### 4. Kebijakan Tepat atau Tidak

Dalam hal kebijakan pemerintah telah menyusun kebijakan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin. Dalam hal ini tidak terjadi perbedaan antara kedua desa melainkan terjadi kesamaan, pemerintah Kabupaten Sleman memiliki beberapa kebijakan tentang desa wisata terutama terkait dengan kebijakan pengembangan. Terkait dengan desa wisata saat ini, Pemerintah Kabupaten Sleman sedang dalam proses pembuatan peraturan Bupati tentang Desa Wisata Kabupaten Sleman. Dalam hal kebijakan sudah tercapai dan kebijakan tepat karena Pemerintah Kabupaten Sleman juga sudah lama sampai saat ini membuat kebijakan pengembangan Pariwisata termasuk didalamnya pengembangan desa wisata secara konsisten.

#### 5. Sejauh Kebijakan tersebut Menghasilkan Tingkat Perubahan Terhadap Kondisi yang Ada

kebijakan yang dilakukan dengan tepat akan berdampak juga dalam setiap perubahan, jika dijalankan dengan baik pula. Dalam hal ini terjadi perbedaan yang sangat besar antara Desa Wisata Brayut dan Desa Wisata Pajangan, Dimana desa wisata Pajangan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Bisa dilihat data yang ada di atas jumlah kunjungan di Desa Brayut tiap tahun semakin meningkat dari tahun 2006 jumlah kunjungan hanya 57 hingga 2012 naik mencapai 11.874. Sedangkan yang terjadi di Desa Pajangan tidak mengalami perubahan yang baik sejak tahun 2006 jumlah kunjungan 0 (nol) hingga 2012 tidak ada pergerakan masih tetap 0 (nol), tetapi pada tahun 2011 pernah mengalami kemajuan jumlah kunjungan meningkat menjadi 337.

## 6. Jenis Manfaat Yang Diterima Oleh Kelompok Kepentingan Melalui Kebijakan

Dan manfaat yang diterima dari kebijakan ini, terjadi perubahan di desa wisata Brayut. Telah adanya Homestay sebanyak 24 dengan total kapasitas 151 dan jenis usaha juga bermunculan seperti, laundry, warung kopi, warung kelontong, penyewaan alat pemancingan, penyewaan alat pertanian dan toko permainan tradisional. Sedangkan Di Desa Pajangan tidak mengalami perubahan, tidak terbukanya lapangan pekerjaan. Hal ini bisa dimaklumi karena seperti yang sudah di paparkan sebelumnya bawa kunjungan di Desa Wisata Pajangan sangat sedikit, dan berdasarkan pengamatan peneliti beberapa kali Desa wisata Pajangan hanyalah Dusun biasa, Tidak ada aktifitas yang menunjang seperti homestay apa lagi kegiatan wisata.

### B. Konteks Kebijakan

Dampak yang positif lebih terjadi di Desa Wisata Brayut, di mana semenjak mendapat PNPM Mandiri Pariwisata Desa Wisata Brayut mengalami peningkatan dan perbaikan di beberapa sisi. Peningkatan dan perbaikan yang terjadi di Desa Wisata Brayut diawali dengan peningkatan kapasitas kualitas SDM yang terdiri dari masyarakat dan pengurus Desa Wisata Brayut. Pada tahun 2009, dana yang diterima dimanfaatkan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Sedangkan pada tahun 2010 dan 2011, dana yang diterima untuk meningkatkan dan memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di Desa Wisata Brayut. Dengan peningkatan dan perbaikan kualitas SDM dan fasilitas yang ada di Desa Wisata Brayut menjadikan kualitas pelayanan pun semakin baik. Sehingga banyak wisatawan yang datang ke Brayut, dan secara otomatis pendapatan masyarakat meningkat. Diakui oleh beberapa narasumber bahwa PNPM Mandiri Pariwisata yang diterima Desa Wisata Brayut menjadikan kondisi desa wisata menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Dari hal tersebut dapat

disimpulkan bahwa kinerja implementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut adalah kinerja yang tinggi atau kinerja yang baik.

Sebaliknya, kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata yang diimplementasikan di Desa Wisata Pajangan tidak menyebabkan perubahan kondisi ke arah yang lebih baik. Diakui oleh beberapa narasumber bahwa Desa Wisata Pajangan walaupun sudah mendapat PNPM Mandiri Pariwisata, Hal tersebut tidak menjadikan masyarakat di Desa Wisata Pajangan menjadi lebih sejahtera. Dana PNPM Mandiri Pariwisata yang diterima pada tahun 2009, 2010, dan 2011 hanya digunakan untuk membeli alat musik tradisional seperti gamelan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja implementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Pajangan adalah kinerja yang rendah.

## B. Saran

Dari hasil penelitian tentang kinerja implementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut dan Desa Wisata Pajangan, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi agar kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata kedepannya bisa menjadi lebih baik terutama pada tataran implementasinya. Berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh peneliti:

1. Perlu ada pelatihan kelembagaan dalam rangka menguatkan peran dan komitmen pengurus desa wisata. Karena bagaimanapun peran lembaga dan pengurus sangat penting, utamanya dalam menggerakkan minat masyarakat;
2. Pelatihan kelembagaan bisa dimasukkan ke dalam permen tentang pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata yang dilaksanakan oleh dinas terkait (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata).
3. Peran Pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengawasi jalannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan secara maksimal, khususnya kepada pengurus kelembagaan. Sehingga program yang sudah dirancang bisa dijalankan oleh pengurus kelembagaan setiap Desa.